

**SKRIPSI**

**DASAR PERTIMBANGAN HAKIM DALAM MENJATUHKAN SANKSI  
PIDANA PENJARA TERHADAP PENGGUNA NARKOTIKA  
(STUDI DI PENGADILAN NEGERI KELAS IA PADANG)**

*Diajukan Untuk Memenuhi Sebagian Persyaratan  
Guna Memperoleh Gelar Sarjana Hukum*

Oleh :

**UNIVERSITAS ANDALAS**  
**IVA YUNIVON SORAYA**

**1610113030**

**Program Kekhususan : Hukum Pidana (PK IV)**



**Pembimbing :**

**Tenofrimer, S.H., M.H**  
**Lucky Raspati, S.H., M.H**

**FAKULTAS HUKUM**  
**UNIVERSITAS ANDALAS**  
**PADANG**

**2021**

**DASAR PERTIMBANGAN HAKIM DALAM MENJATUHKAN SANKSI  
PIDANA PENJARA TERHADAP PENGGUNA NARKOTIKA  
(STUDI DI PENGADILAN NEGERI KELAS IA PADANG)**

*(Iva Yunivon Soraya, 1610113030, Fakultas Hukum Universitas Andalas, 2021, 99  
halaman)*

**ABSTRAK**

Indonesia merupakan negara hukum, yang mana secara konstitusional telah disebutkan pada Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar 1945. Indonesia sebagai negara hukum memiliki ciri-ciri dan tujuan tersendiri yang mana terlihat dari penerapan konsep atau bentuk negara hukum yang dianutnya. Adanya hukum bertujuan untuk menciptakan kedamaian pada hidup masyarakat, dan meminimalkan terjadinya tindak pidana. Tetapi tujuan dari hukum itu tidak terlaksana dengan semestinya di Indonesia saat ini. Tindak pidana narkoba sangat marak terjadi. Pengaturan terhadap narkoba telah ada di atur didalam Undang-undang No 35 Tahun 2009 tentang Narkoba. Tujuannya untuk melakukan penegakan hukum agar tidak terjadi tindak pidana narkoba. Kasus tindak pidana narkoba di Indonesia saat ini sangat tinggi, hal itu memiliki dampak buruk terhadap lapas yang ada di Indonesia yaitu terjadinya over kapasitas Lapas. Pada Pasal 127 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba pada ayat (1) disebutkan bahwa sanksi untuk penyalahguna narkoba adalah pidana penjara, namun pada ayat 2 dan 3 di sebutkan lagi kalau hakim wajib memberikan rehabilitasi sosial atau medis terhadap penyalahguna narkoba. Namun praktek dilapangan banyaknya putusan hakim yang menjatuhkan sanksi pidana penjara. Oleh karena itu yang menjadi persoalan dalam penelitian ini antara lain: 1) Apa dasar pertimbangan hakim dalam menjatuhkan sanksi pidana penjara terhadap pengguna narkoba? 2) Bagaimana pertimbangan hakim tidak memeberikan rehabilitasi terhadap pengguna narkoba di Pengadilan Negeri Kelas IA Padang? Adapun penelitian ini menggunakan metode yuridis sosiologi (empiris) yang bersifat deskriptif, menggunakan jenis data primer dan jenis data sekunder, sumber data didapatkan oleh penulis dari penelitian lapangan dan kepustakaan, dan pengumpulan data dilakukan dengan cara wawancara dan studi dokumen. Dari hasil penelitian diketahui bahwa penjatuhan sanksi pidana penjara terhadap penyalahguna narkoba berdasarkan pada tuntutan dari jaksa pentuntu umum, selain itu terdapat kelemahan-kelemahan pada undang-undang narkoba, yang mana ada ke tidak seimbangan antara pasal 127 ayat (1) dengan ayat (2),(3).

**Kata Kunci:** *Narkoba, Rehabilitasi dan Penyalahguna Narkoba*